

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbaikan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya yang tepat dan terencana diharapkan dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan perekonomian yang hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat secara merata. Selain itu masyarakat diharapkan juga mampu menjadi motor dalam proses pembangunan melalui perannya dalam berbagai sektor dalam perekonomian.

Dewasa ini masyarakat Indonesia dituntut untuk mampu mengelola keuangan dengan tepat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan finansial yang tepat dan efektif merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Jika suatu negara masyarakatnya memiliki pemahaman tentang literasi keuangan (*financial literacy*) yang baik, maka akan berimbas pada perbaikan perekonomian negara tersebut. Dan sebaliknya, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang baik maka suatu negara dapat menyebabkan pembangunan dan pertumbuhan ekonominya akan melambat. Hal tersebut akan berdampak negatif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Lusardi (2007) literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk menyongsong globalisasi, lebih spesifiknya globalisasi masalah dalam bidang keuangan. menurut Otoritas Jasa keuangan (OJK) literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Keterampilan seseorang dalam perencanaan dan manajemen keuangan menjadi suatu keniscayaan yang harus dimiliki dan dikuasai agar bisa menjadi masyarakat yang berkualitas.

Literasi keuangan bertujuan bukan untuk mempersulit seseorang menggunakan atau membelanjakan uang yang mereka miliki, tetapi justru dengan literasi keuangan seseorang dapat meningkatkan taraf hidup di kemudian hari dengan pengalokasian sumber daya keuangannya dengan tepat untuk memenuhi tujuan kesejahteraannya (Warsono, 2010). Seseorang harus bisa mengelola pendapatannya bukan hanya untuk sesuatu yang konsumtif saja, melainkan untuk investasi jangka panjang. Misalnya untuk investasi di produk-produk keuangan seperti asuransi, bank, pasar modal, dana pensiun, pegadaian dan lain sebagainya. Selain itu masyarakat juga memerlukan investasi dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masing-masing.

beberapa cara untuk melihat peningkatan tingkat literasi keuangan pada masyarakat dengan cara melihat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan. Hal tersebut dapat tercermin dari perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional. Merujuk pada UU No.10 Tahun 1998, Dana Pihak Ketiga didefinisikan sebagai Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat giro, dan tabungan dalam bentuk lainnya.

Bersarkan data Bank Indonesia dapat diketahui bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut mencerminkan bahwasannya masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan untuk menabung dan berinvestasi pada lembaga keuangan perbankan nasional. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan tren positif selalu mengalami peningkatan pertumbuhan DPK perbankan nasional setiap tahunnya. Kita lihat tingkat DPK pada tahun 2013 sebesar 3.663.968 milyar, pada tahun 2014 tingkat DPK mengalami peningkatan yang berada pada angka 4.114.420 milyar. Tren positif peningkatan pertumbuhan DPK tersebut masih berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Tingkat DPK semakin meningkat pada tahun 2015 sebesar 4.413.006 milyar, dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 4.836.758 milyar. Masih merujuk pada laporan Bank Indonesia untuk tingkat DPK di tahun 2017 juga masih terus meningkat pada angka 5.199.486 milyar.

Akan tetapi data diatas berbading terbalik dengan data Findex Bank Dunia 2014, yang menunjukkan bahwa hanya sebesar 36% jumlah penduduk Indonesia yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal. Jumlah yang cukup rendah jika kita melihat total jumlah penduduk Indonesia yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses ke lembaga keuangan formal ataupun perbankan hanya diakses oleh sebagian dari masyarakat Indonesia karena berbagai alasan, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan terhadap lembaga keuangan serta wawasan tentang pengelolaan keuangan.

Merujuk pada Laporan SNLIK (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan) Indonesia yang dilaksanakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2016 maka dapat diperoleh hasil bahwa masyarakat Indonesia yang termasuk dalam golongan *well literate* pada tahun 2013 sebesar 21,84%, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 29,66%. Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut sebetulnya menunjukkan kenaikan tingkat Literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 7,82%. Akan tetapi sebenarnya angka presentase tersebut masih menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih relatif rendah.

Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan industri jasa keuangan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk keuangan yang tidak berimbang. Disaat perkembangan industri keuangan yang begitu dinamis, masih saja banyak masyarakat yang tidak memahami akses terhadap produk dan jasa

keuangan. Hal tersebut sebenarnya sangat merugikan masyarakat itu sendiri karena tidak bisa menikmati keuntungan dari produk keuangan yang terus berkembang dan mudah ditipu oleh penawaran produk keuangan dan investasi bodong apabila kurang pengetahuan dan wawasan.

**TABEL 1.1**  
**Indeks Literasi Keuangan Masyarakat**  
**Indonesia 2016**

INDEKS	Indeks (%)	
	2013	2016
Literasi Keuangan	21,84%	29,66%

Sumber: OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 2016

Pemerintah melalui Otoritas jasa keuangan terus berupaya menggejot untuk meningkatkan tingkat literasi dan pendidikan keuangan dengan membentuk program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai wadah untuk pendidikan keuangan. Menurut Nababan dan Sadalia (2011) pendidikan keuangan adalah proses panjang yang memacu individu untuk memiliki rencana keuangan dimasa depan demi memperoleh kesejahteraan yang sesuai dengan pola dan gaya hidup yang mereka jalani.

Dalam Penelitian terdahulu, Byrne (2007) berpendapat jika minimnya pengetahuan tentang literasi keuangan akan mengakibatkan kesalahan dalam menyusun rencana keuangan dan mengakibatkan bias untuk pencapain kesejahteraan pada usia yang sudah tidak produktif. Jika jumlah masyarakat yang seperti ini banyak, maka akan berpengaruh terhadap stabilitas keuangan nasional. Sedangkan Agusta (2016) menilai

bahwa jika peningkatan pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan akan berimbas pada tingginya pembiayaan pembangunan nasional, hal tersebut didasari oleh semakin tinggi jumlah masyarakat yang menabung ataupun berinvestasi pada produk dan jasa keuangan maka akan meningkatkan likuiditas untuk transaksi keuangan dan pembiayaan pembangunan yang mana nantinya secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan ekonomi.

Edukasi tentang pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan juga untuk kalangan penyandang disabilitas. Disabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *disability* yang didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Para penyandang disabilitas sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitarnya dan terlupakan dari perhatian pemerintah untuk memperoleh hak yang sama seperti masyarakat lainnya. Kendala terhadap akses pendidikan, memperoleh lapangan pekerjaan, dan akses terhadap lembaga keuangan merupakan permasalahan kompleks yang dialami oleh kaum penyandang disabilitas. Hal tersebut yang membuat mereka terhalangi untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan merasakan efek dari pembangunan pemerintah seperti masyarakat pada umumnya, sehingga program pemerataan kesejahteraan yang dilakukan oleh negara kurang mereka rasakan manfaatnya.

Sesuai dengan UUD NKRI 1945 dalam pasal 27 yang berbunyi :  
“Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam menjalankan pemerintah di negara Indonesia, pemerintah wajib memberikan dan menyediakan pekerjaan yang layak bagi setiap warga negaranya tanpa diskriminatif. Dengan itu salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan adalah dengan pendidikan atau pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas

Banyaknya problematika yang dihadapi oleh penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai akses terhadap fasilitas umum menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak seperti masyarakat lainnya. Sedangkan diantara mereka banyak yang bekerja menggantungkan nasib untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Permasalahan kekurangan fisik yang mereka alami berimbas pada sulitnya para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, oleh karena itu maka diantara mereka banyak yang menggantungkan hidup mereka dengan bekerja mandiri dengan menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pengetahuan tentang literasi keuangan sangat dibutuhkan para penyandang disabilitas khususnya yang menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemahaman dan pengetahuan terhadap akses lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk

perkembangan dan keberlangsungan usaha mereka. UMKM memberikan andil yang besar terhadap kuota lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada dan meningkatkan roda perekonomian negara. Semakin meningkatnya kemampuan literasi keuangan para pelaku UMKM akan berpengaruh terhadap kinerja dan keberlanjutan usahanya.

UMKM tidak bisa dipungkiri menjadi penyangga perekonomian Indonesia. Hal tersebut terbukti ketika terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 dan krisis global. Ketika usaha-usaha besar di Indonesia tumbang, UMKM justru masih eksis dan terus mampu bertahan. Faktor-faktor yang menyebabkan UMKM memiliki daya tahan yang kuat terhadap krisis karena sebagian besar yang dihasilkan oleh UMKM adalah produk dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ketika pendapatan yang diperoleh masyarakat kecil, hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap permintaan karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, UMKM sendiri rata-rata berdiri dengan kekuatan sumber daya lokal, yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, hingga modal. Sehingga UMKM tidak tergantung dengan bahan-bahan impor dari luar negeri yang harganya melambung tinggi ketika terjadinya krisis (Menurut Hadiwijoyo, Rohmad - Ketua Dewan Direktur CIDES (Center for Information and Development Studies) dalam Kompas.com, 28 maret 2012 pukul 11:09 WIB).



Merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 menggambarkan jika UMKM mampu untuk bertahan terhadap guncangan krisis. BPS mencatat bahwa pada tahun 1997 penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan kecil sebesar 87,62% (57,40 juta), perusahaan sedang sebesar 11,75% (7,7 juta) dan pada perusahaan besar 0,61% (0,393 juta). Sedangkan data tahun 1998 penyerapan tenaga oleh perusahaan kecil sebesar 88,66% (57,34 juta), pada perusahaan menengah sebesar 10,78% (6,9 juta), dan pada perusahaan besar sebesar 0,56 % (0,364 juta). Selain itu menurut Bank Indonesia, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,3% dan terhadap tenaga kerja Indonesia sebesar 97% (Bisnis.com, 26 Agustus 2016).

UMKM yang menjadi salah satu penyangga perekonomian di Indonesia masih memiliki berbagai kendala yang krusial. Permasalahan dan kendala yang terjadi di kalangan pelaku UMKM seperti pengetahuan masyarakat terhadap akses lembaga keuangan untuk modal pembiayaan UMKM itu sendiri. Sehingga kemampuan literasi keuangan (*financial literacy*) menjadi sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM supaya mampu mengambil keputusan yang tepat untuk memperbaiki kinerja usahanya (Cahyono, 2012).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah yang terkenal dengan budayanya yang ikonik dan alam yang indah juga menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun manca negara untuk

berkunjung. Daerah istimewa Yogyakarta dijuluki dengan sebutan “*kota pelajar*”, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak perguruan tinggi yang terkenal. Hal tersebut berimbas terhadap banyaknya mahasiswa dari luar daerah berdatangan untuk menimba ilmu. Dua faktor tersebut memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat Yogyakarta. Akan tetapi dampak pembangunan ekonomi mungkin kurang bisa dirasakan sebagian masyarakat Yogyakarta, salah satunya adalah para penyandang disabilitas. Karena alasan keterbatasan fisik menyebabkan mereka kesulitan untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi yang ada.

Menurut Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 mencatat bahwasannya jumlah penyandang disabilitas yang ada di DIY sebesar 25.050 jiwa. Jumlah populasi tersebut cukup besar yang terbagi dari lima kabupaten/kota di DIY. Berikut adalah data penyandang disabilitas di setiap kabupaten di DIY yang terdata oleh Dinas Sosial DIY :

**TABEL 1.2**  
**Jumlah Penyandang Disabilitas di DIY**

<b>Wilayah</b>	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas</b>
Kulonprogo	4.399
Bantul	5.437
Gunungkidul	7.860
Sleman	5.535
Kota Yogyakarta	1.819

Sumber : Dinas Sosial DIY 2016

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Gunungkidul menjadi daerah yang memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak sebesar 7.860 jiwa. Disusul oleh Kabupaten sleman diurutan kedua dengan jumlah penyandang disabilitas sebesar 5.535 jiwa. Selanjutnya Kabupaten Bantul dengan 5.437 jiwa dan Kabupaten Kulonprogo memiliki 4.399 jiwa penyandang disabilitas. Sedangkan Kota Yogyakarta menjadi daerah yang memiliki jumlah populasi penyandang disabilitas paling sedikit yaitu sebesar 1.819 jiwa.

Kabupaten Sleman menempati posisi kedua sebagai daerah dengan jumlah penyandang disabilitas di DIY menurut data Dinas Sosial DIY. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah setempat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan atau yang biasa disebut Diklat agar para penyandang disabilitas memiliki keterampilan dan wawasan dalam dunia kerja, sehingga mereka terhindar dari jurang kemiskinan.

Menurut Dinas Koperasi dan UMKM DIY pada tahun 2016, Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki kontribusi sebesar 95% terhadap perekonomian DIY. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi penyangga dan penopang perokonomian di DIY, sehingga segala cara yang mampu untuk mendukung dalam perkembangan dan kemajuan UMKM harus diupayakan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY 2017, Kabupaten Sleman menjadi daerah yang memiliki jumlah UMKM terbanyak di DIY yang berjumlah 27,119 pelaku UMKM. Hal tersebut secara tidak langsung menggambarkan Kabupaten Sleman

memiliki andil yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY. Fakta ini harus menjadi acuan bagi pihak yang terkait agar mampu memberikan bantuan berupa kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. UMKM berperan sangat vital dalam perekonomian karena membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat, sehingga tingkat pengangguran berkurang dan membantu roda perekonomian.

Dinas Sosial Kabupaten Sleman terus memberikan pendampingan dan pelatihan guna mendorong agar para penyandang disabilitas mampu berdiskusi dalam perekonomiannya. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Sleman menyediakan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan kelas kewirausahaan untuk terus mendorong para penyandang disabilitas agar menjadi pelaku UMKM. Penyandang disabilitas yang menjadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 merujuk pada data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman berjumlah 128 jiwa. Akan tetapi angka tersebut masih terbilang kecil bila dibandingkan dengan total jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman yang berjumlah 5.535 jiwa. Dinas Sosial dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman bekerjasama sama dengan dengan berbagai yayasan dan komunitas yang menaungi para difabel untuk menelusuri potensi dan mengembangkan usaha mereka.

Salah satu komunitas penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Sleman yaitu Persatuan Difabel Ngaglik (PDN) perlu mendapat apresiasi karena mampu mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bank

Difabel pada tahun 2016 yang didukung dan didampingi oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah. Gagasan tersebut terbuntut ketika Persatuan Difabel Nganglik (PDN) ingin mengembangkan usaha para anggotanya yang banyak terkendala sulitnya mendapatkan pinjaman permodalan dari perbankan karena memandang sebelah mata potensi usaha yang mereka miliki yang disebabkan keterbatasan fisik para penyandang disabilitas. Maka dibentuklah Koperasi Simpan Pinjam Bank Difabel untuk menuntaskan masalah permodalan dan layanan keuangan lainnya yang banyak mereka alami.

Para penyandang disabilitas yang menjadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman harus memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Karena tidak bisa dipungkiri aspek permodalan menjadi poin yang sangat penting dalam pengembangan UMKM. Selain itu para penyandang disabilitas yang menjadi pelaku UMKM juga harus cermat dalam memilih wadah investasi untuk masa depan. Investasi yang diharapkan manfaat dan keuntungan di masa yang akan datang jangan sampai menjadi problematika yang merugikan mereka karena salah dalam memilih produk investasi yang tidak jelas. Pengelolaan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari dan perencanaan keuangan yang baik memberikan andil yang besar bagi kesejahteraan finansial mereka.

Sebagian besar penyandang disabilitas yang menjadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman berada pada golongan usaha kecil. Kriteria

usaha kecil dijelaskan menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menjelaskan bahwa Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria antara lain adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta ini tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, peneliti tertarik untuk melakukan riset tentang tingkat literasi keuangan (*financial literacy*) yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas yang menjadi pelaku usaha kecil di Kabupaten Sleman. Maka peneliti memberikan judul penelitian ini dengan **“ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN PADA PENYANDANG DISABILITAS PELAKU USAHA KECIL DI KABUPATEN SLEMAN”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah peneliti fokus mengamati dan menganalisis tentang tingkat literasi keuangan pada para penyandang disabilitas yang menjadi pelaku usaha kecil di Kabupaten Sleman dan untuk meneliti perbedaan tingkat literasi

keuangan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jenis usaha.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, telah diperoleh beberapa rumusan masalah terkait tentang tingkat literasi keuangan pada penyandang disabilitas yang menjadi pelaku usaha kecil di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

- a. Bagaimana tingkat literasi keuangan pada penyandang disabilitas yang menjadi pelaku usaha kecil di Kabupaten Sleman?
- b. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pada penyandang disabilitas pelaku usaha kecil di Kabupaten Sleman?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini memiliki tujuan diantaranya :

- a. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan pada penyandang disabilitas pelaku usaha kecil di Kabupaten Sleman.
- b. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan pada penyandang disabilitas pelaku usaha kecil di Kabupaten Sleman.

### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Menjadi solusi bagi para penyandang disabilitas yang menjadi pelaku usaha kecil di Kabupaten Sleman untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan.
- b. Menjadi referensi bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan gambaran supaya mampu mengedukasi dan menyediakan layanan

keuangan yang mudah diakses oleh para penyandang disabilitas yang menjadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman guna memajukan dan mengembangkan usahanya.

- c. Menjadi referensi bagi para akademisi terkait dengan literasi keuangan untuk menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.